



BUPATI BANGKA BARAT

11 November 2020

Nomor : 050 / 1110 / 4.3.1.1 / 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Perubahan
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Kepada
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi

di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2020 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020, terlampir disampaikan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI BANGKA BARAT,

Drs. H. SAHIRMAN JUMLI, M.Si.

Tembusan :
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.



PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai komitmen untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2020, Perubahan Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan "**Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021**".

Muntok, 11 November 2020


BUPATI BANGKA BARAT,

H. SAHIRMAN JUMLI, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum.....	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	1 - 3
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat	1 - 4
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah	1 - 4
1.4.2. Kondisi Demografi	1 - 6
1.4.3. Kondisi Ekonomi Daerah	1 - 7
1.4.4. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	1 - 14
1.4.5. Sosial Budaya	1 - 18
1.5. Sistematika Penyusunan	1 - 23
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2020.....	2 - 2
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	2 - 3
2.4. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2020.....	2 - 4
2.5. Perubahan APBD Tahun 2020.....	2 - 10
BAB III PENUTUP	3 - 1
LAMPIRAN	
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
- PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	1 - 6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019.....	1 - 7
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Persentase)	1 - 9
Tabel 1.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019 (Persentase)	1 - 11
Tabel 2.1	Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 2
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 3
Tabel 2.3	Target Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 4
Tabel 2.4	Target Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 6
Tabel 2.5	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020	2 - 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka Barat	1 - 5
Gambar 1.2	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 (juta rupiah)	1 - 8
Gambar 1.3	PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 menurut lapangan usaha (ribu rupiah)	1 - 13
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per Bulan September Tahun 2020	1 - 17
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat per Bulan September Tahun 2020	1 - 18
Gambar 1.6	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 (Persentase)	1 - 19
Gambar 1.7	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 (Tahun)	1 - 19
Gambar 1.8	Angka Rata - Rata Lama Sekolah dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 (Persentase)	1 - 19
Gambar 1.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019	1 - 21
Gambar 1.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019	1 - 22
Gambar 1.11	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	1 - 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaiannya (Program dan Kegiatan) yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, maka selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Diharapkan melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini, dapat menjadi komitmen dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2020 serta dapat dicapai dengan didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri A);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

1.4.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama $\pm 284.886,05$ ha, luas daratan di pulau-pulau kecil $\pm 214,85$ ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 285.100,90 ha.

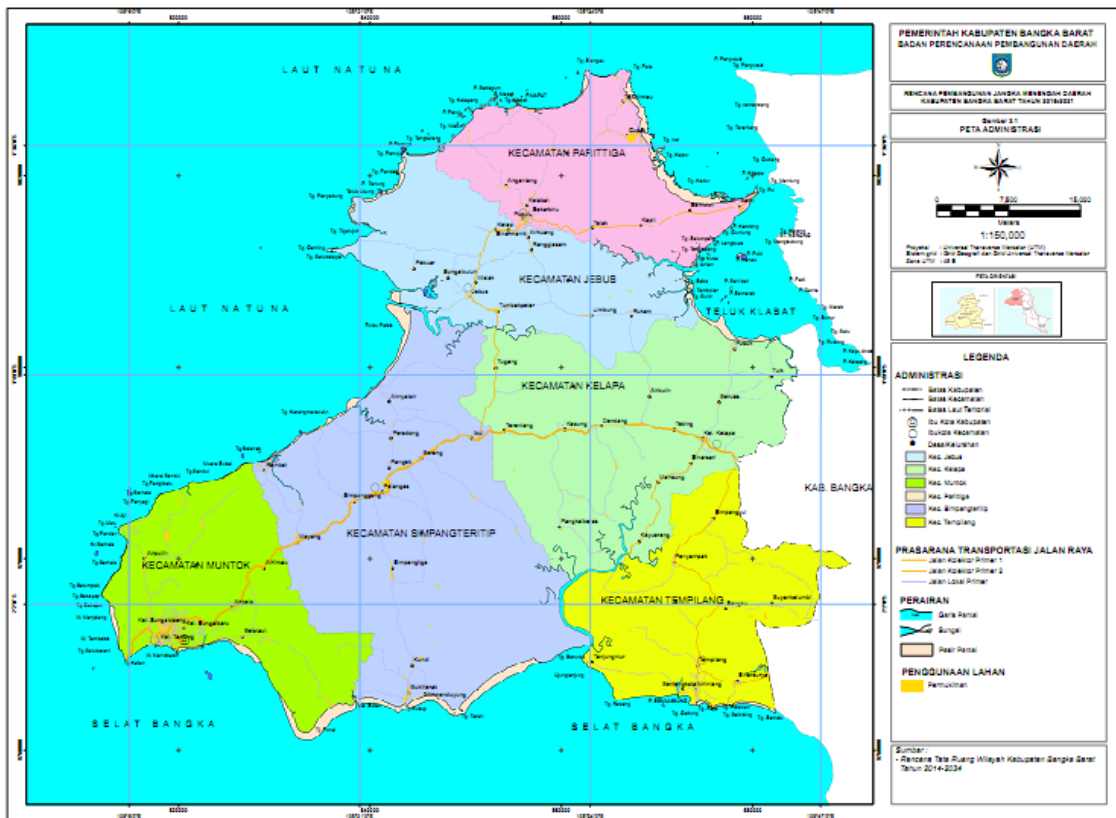
Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105°00' – 106°00, Bujur Timur dan 01°00' – 02°10, Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Peta wilayah administratif Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten
per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (ha)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpang Teritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

1.4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang telah terverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pada Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 198.088 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1.022 jiwa dari jumlah penduduk Tahun 2018 yaitu 197.066 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 terdiri dari 101.883 jiwa laki-laki (51,43 persen) dan 96.205 jiwa perempuan (48,57 persen) meningkat dari Tahun 2018 yang terdiri dari 101.373 jiwa laki-laki (51,44 persen) dan 95.693 jiwa

perempuan (48,56 persen). Jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muntok	26.322	25.431	51.753
2.	Simpangteritip	14.978	14.342	29.320
3.	Jebus	11.250	10.540	21.790
4.	Kelapa	17.614	16.236	33.850
5.	Tempilang	14.115	13.138	27.253
6.	Parittiga	17.604	16.518	34.122
	Total	101.883	96.205	198.088

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2020

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

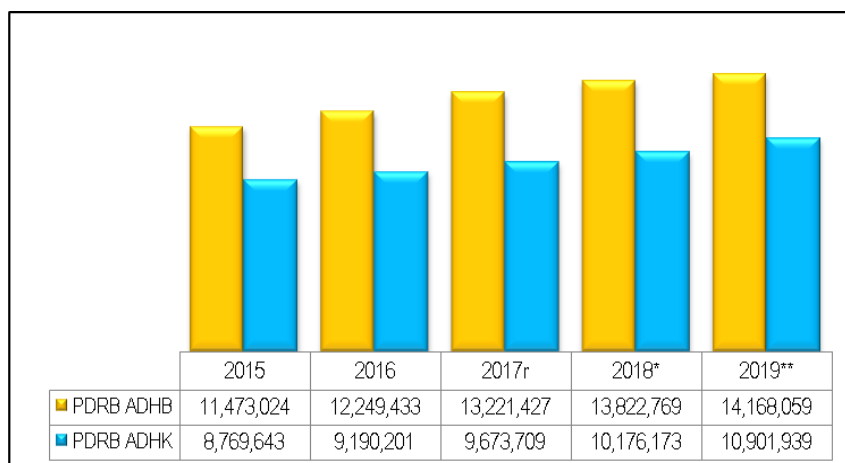
Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

1.4.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau

perkembangan ekonomi suatu daerah. Keterbatasan pengolahan data yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengakibatkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap data statistik dari BPS.

Gambar 1.2
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015 - 2019 (juta rupiah)



Keterangan : r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) secara berkala.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,42	7,46	-0,21	0,82	-0,24
B	Pertambangan dan Penggalian	2,25	0,65	2,41	0,55	1,26
C	Industri Pengolahan	4,03	3,35	6,53	6,86	11,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,70	3,11	6,17	8,55	15,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,27	7,04	7,59	0,84	3,31
F	Konstruksi	8,24	9,14	7,05	7,23	4,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,22	7,80	7,35	5,50	5,17
H	Transportasi dan Pergudangan	5,44	6,52	7,85	6,00	2,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	7,90	5,83	4,44	3,93
J	Informasi dan Komunikasi	8,19	9,12	8,43	9,50	11,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,38	4,38	2,04	6,55	7,14
L	Real Estate	4,61	6,05	5,05	7,29	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	4,06	4,21	4,10	4,49	2,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,55	7,48	7,80	8,08	6,08
P	Jasa Pendidikan	9,63	9,42	9,76	9,12	6,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,58	8,08	8,90	8,17	6,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,66	10,21	7,80	4,13	4,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,03	4,80	5,26	5,19	7,13

Keterangan : ^r) angka revisi
^{*}) angka sementara
^{**}) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Pada Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2018 sebesar 5,19 persen atau terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 37,38 persen di Tahun 2019.

Dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, 7 kategori mengalami pertumbuhan positif, sementara 10 kategori lapangan

usaha mengalami perlambatan. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas dan Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2019.

Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sekaligus merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 44,95 persen dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat. Sementara, dua kategori yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019, tidak memberikan kontribusi besar pada PDRB Kabupaten Bangka Barat. Adapun angka pertumbuhan tiga kategori tertinggi masing-masing adalah 15,06 persen untuk Pengadaan Listrik dan Gas; 11,97 persen untuk Industri Pengolahan; 11,50 persen untuk kategori Informasi dan Komunikasi.

Sejalan dengan pertumbuhan yang tinggi, secara nilai keseluruhan kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan melalui nilai PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun ADHK.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.4
Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015-2019 (Persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017 ^r	2018 [*]	2019 ^{**}
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,4	15,17	14,11	12,13	11,63
B	Pertambangan dan Penggalian	11,59	10,92	10,71	9,49	8,31
C	Industri Pengolahan	43,85	41,94	42,20	43,76	44,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	5,97	6,29	6,66	7,21	7,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,54	13,49	14,00	14,78	14,42
H	Transportasi dan Pergudangan	0,91	0,92	0,92	0,96	0,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	1,17	1,17	1,20	1,26
J	Informasi dan Komunikasi	0,29	0,30	0,31	0,33	0,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,41	0,40	0,42	0,45
L	Real Estate	1,95	2,02	2,01	2,06	2,08
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	4,37	4,45	4,52	4,73
P	Jasa Pendidikan	1,60	1,75	1,79	1,82	1,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,74	0,76	0,80	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,27	0,30	0,30	0,31	0,32
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Keterangan : ^r) angka revisi
^{*}) angka sementara
^{**}) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; serta lapangan usaha Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini menyumbang sebesar 44,95 persen terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan sebesar 14,42 persen, disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,63 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mempunyai peranan 8,31 persen, sedangkan lapangan usaha Konstruksi memiliki peranan sebesar 7,52 persen.

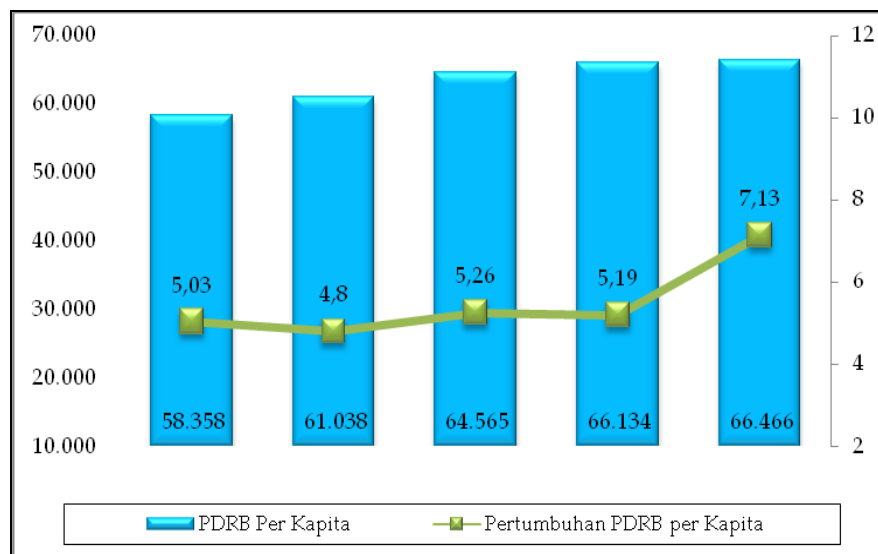
Selama periode 2015-2016, peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 43,85 persen turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 41,94 persen. Meskipun demikian, mulai dari tahun 2017 terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 kontribusinya mencapai 44,95 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dimana kontribusinya sebesar 14,40 persen pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 15,17 persen pada tahun 2016. Meskipun demikian, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 14,11 persen, terus turun hingga pada tahun 2019 kontribusinya menjadi sebesar 11,63 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah menurunnya produksi beberapa

komoditas strategis perkebunan dan rendahnya harga komoditas strategis perkebunan di pasar internasional.

3) PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 1.3
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015 - 2019 (Ribu Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat sebesar 66.466 juta rupiah, meningkat dari

tahun 2018 dengan nilai 66.134 juta rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 332 juta rupiah.

1.4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Sejalan dengan kebutuhan serta evaluasi terkait perangkat daerah, di tahun 2017 dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 dan pada tahun 2020 dilakukan perubahan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Badan/Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana (ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

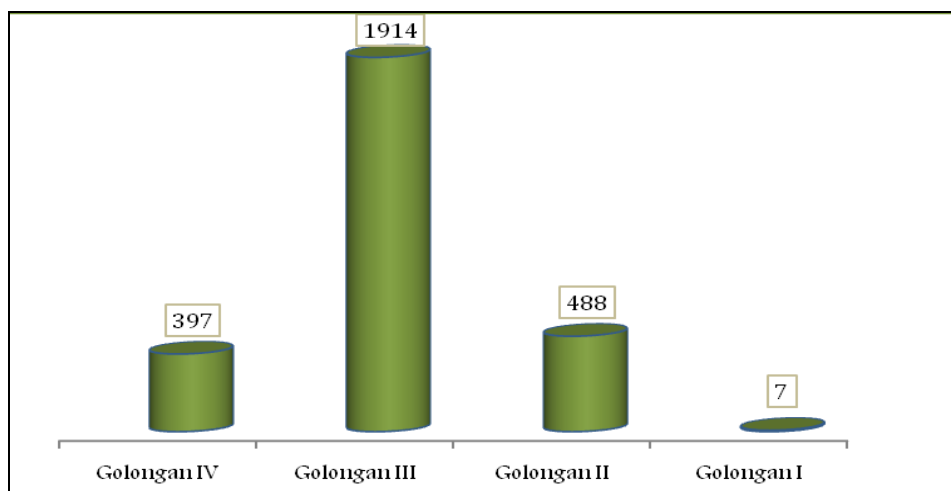
f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.

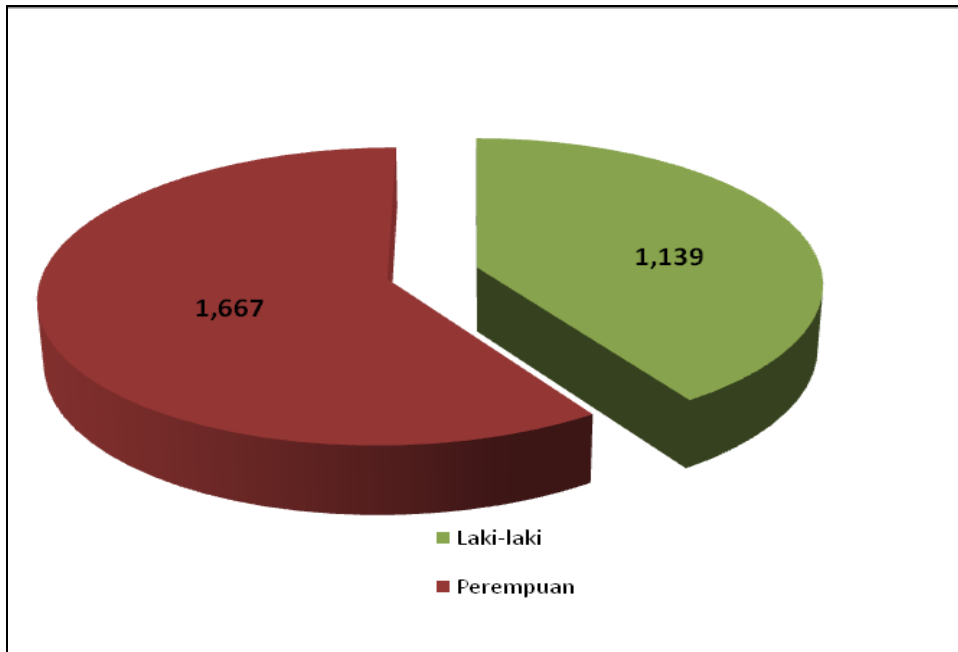
Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sampai dengan Bulan September 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.806 orang.

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Barat per Bulan September 2020



Sumber : BKPSDMD, Tahun 2020

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Barat per Bulan September 2020



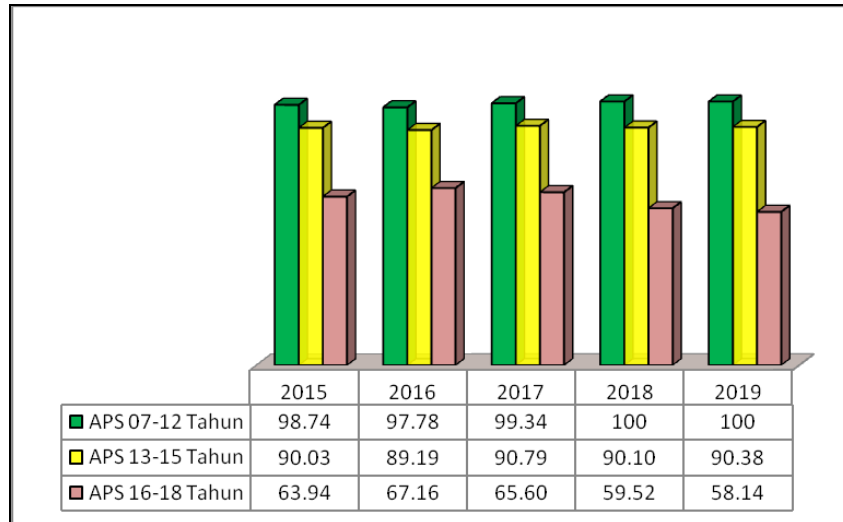
Sumber : BKPSDMD, Tahun 2020

1.4.5 Sosial Budaya

1) Pendidikan

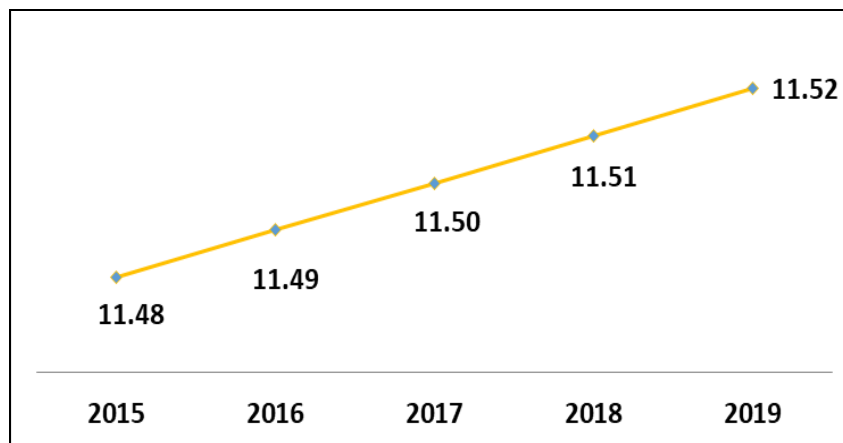
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Gambar 1.6
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 (Persentase)



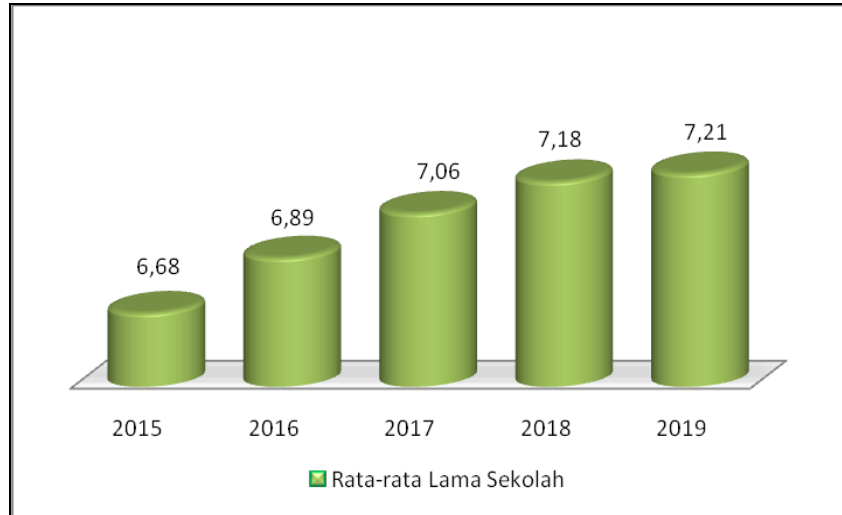
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Gambar 1.7
Angka Harapan Lama Sekolah dan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 (Persentase)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Gambar 1.8
Angka Rata - Rata Lama Sekolah dan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019 (Persentase)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

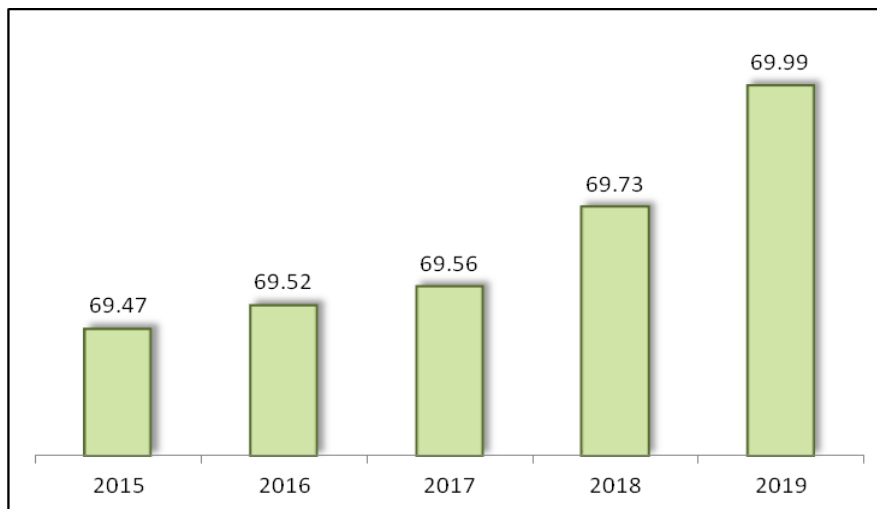
2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum dan untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan.

Jika dilihat perkembangannya AHH di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat dari Tahun 2015 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019

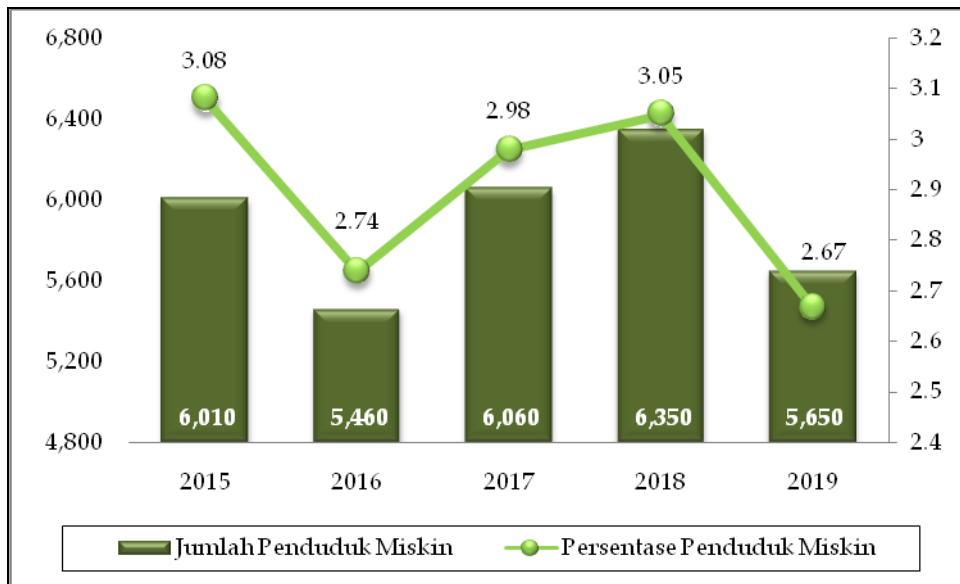


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

3) Penduduk Miskin

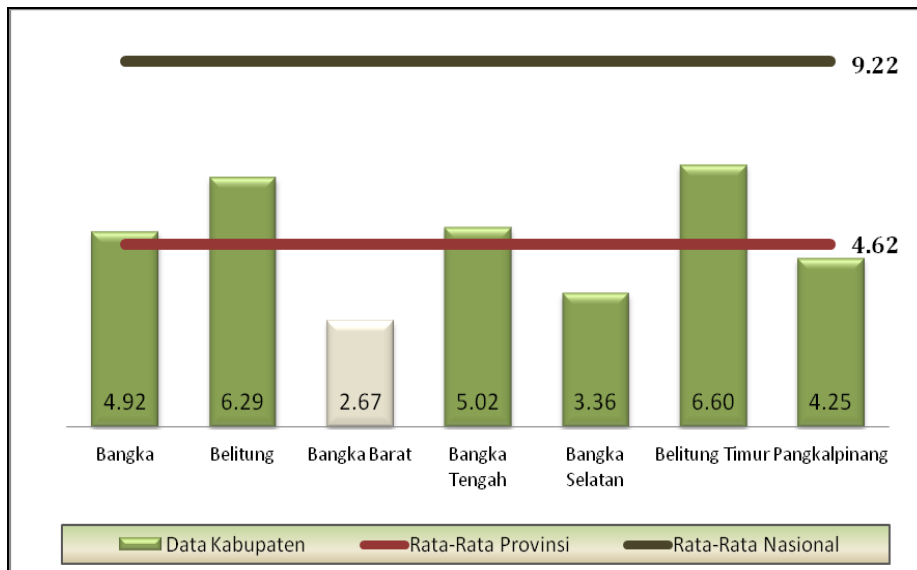
Berdasarkan publikasi dari BPS Kabupaten Bangka Barat, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2019 adalah 5.650 Jiwa atau sebesar 2,67 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebanyak 6.350 jiwa atau sebesar 3,05 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah tersebut paling rendah. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 68.380 jiwa atau sebesar 4,62 persen dan secara nasional jumlah penduduk miskin sebanyak 24.790.000 jiwa atau 9,22 persen.

Gambar 1.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020

Gambar 1.11
Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja serta dilengkapi dengan informasi gambaran umum Kabupaten Bangka Barat dan sistematika penyusunan.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

BAB III : PENUTUP

LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020
- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan bagian dari pembangunan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 beserta perubahannya.

2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Berdasarkan dengan kondisi yang terjadi sekarang, bahwa pada tahun 2020 sebagian dari belahan dunia terpapar virus yang disebut *Corona Viruses Disease 2019* atau COVID-19. Indonesia salah satu Negara yang terpapar COVID-19, yang berdampak sangat signifikan pada pembangunan sehingga terjadi penyesuaian postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat. Menghadapi dan menyesuaikan dengan dinamika sekarang Kabupaten Bangka Barat merevisi tema pembangunan Tahun 2020 menjadi **“PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN PELAYANAN DASAR DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH”**. Melalui prioritas tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan yang selanjutnya mengarah pada fokus pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan.

Berdasarkan tema tersebut maka program / kegiatan strategis Tahun 2020 lebih diarahkan pada upaya-upaya penguatan pelayanan dasar dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sasaran pembangunan Tahun

2020 dan permasalahan serta isu strategis yang berhasil diinventarisir pada saat penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020.

Adapun prioritas pada perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian dan Pengembangan agribisnis/ agroindustri dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian;
2. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, pelayanan dasar, dan pelayanan publik; serta
3. Meningkatkan kualitas birokrasi dan ketatalaksanaan pemerintahan.

2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2020

Adapun target indikator makro yang telah ditetapkan pada RKPD 2020 setelah memperhatikan capaian indikator makro berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 dan data yang dikeluarkan BPS Tahun 2020 dilakukan revisi pada saat penyusunan dokumen perubahan RKPD 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perubahan Target Indikator Makro
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Indikator Makro	Target 2020	Realisasi 2019	Target Perubahan 2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	7,13	(7,01)
2.	Indeks Pembangunan Manusia	69,00	69,05	69,10
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,90	2,67	3,34
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00	2,85	5,08
5.	Pendapatan Per Kapita (Rp)	69.780.000	66.466.000	64.173.193

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bangka Barat, 2020

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan perubahan pada tahun 2019 melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 berdasarkan rekomendasi dan masukan dari Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan perubahan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang memuat target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang kemudian dijadikan target dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-7,01
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,1
		Angka Kemiskinan	%	3,34
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,08
		PDRB Per Kapita	rupiah	64.173.193
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemda yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,44
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	67
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,73
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	79,76
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan public	Nilai	83
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	milyar rupiah	100
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	milyar rupiah	3,391
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68

2.4. TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2020

2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2020

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Target Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks reformasi birokrasi	65

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
2.	Mengembangkan agribisnis/agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	0,98%
3.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100 M
4.	Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah	Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	11,26%
5.	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,26%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	20 %
		Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	39%
6.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Indeks konektivitas kabupaten	1,2
7.	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,10
8.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	68
9.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%

2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

Agar pencapaian pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah Tahun 2020 sesuai dengan tahapan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 beserta perubahannya sesuai dengan perubahan RKPD Tahun 2020. Perubahan dilakukan

berdasarkan evaluasi hasil capaian RPJMD Tahun 2019 sesuai dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Tabel 2.4.

Target Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2020	REALISASI 2019	TARGET PERUBAHAN RKPD 2020
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WDP	WTP
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	8,44%	7,39%	8,44%
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	67	69,24	67
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	80,73	51,55	80,73
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	75%	79,76%	75%
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	83	78,62	83
6.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	1,8 Juta Rupiah	1,02 Juta Rupiah	1,8 Juta Rupiah
7.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	3.391,00 Milyar Rupiah	394,1 Milyar Rupiah	3.391,00 Milyar Rupiah
8.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	563.254,42 Juta Rupiah	2.290.137,50 Juta Rupiah	563.254,42 Juta Rupiah
		Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	6.365,20 Juta Rupiah	2.290,14 Juta Rupiah	6.365,20 Juta Rupiah
		Nilai produksi perikanan budidaya air laut	6.493,00 Juta Rupiah	8.599,61 Juta Rupiah	6.493,00 Juta Rupiah
9.	Meningkatnya nilai produksi peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	33.833 Juta Rupiah	37.720,20 Juta Rupiah	33.833 Juta Rupiah
		Nilai produksi ternak unggas	22.820 Juta Rupiah	32.212,52 Juta Rupiah	22.820 Juta Rupiah

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2020	REALISASI 2019	TARGET PERUBAHAN RKPD 2020
10.	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	0,98%	1,44%	0,98%
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	4,00%	11,55%	4,00%
11.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100 Milyar Rupiah	642 Milyar Rupiah	100 Milyar Rupiah
12.	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang mandiri	Persentase peningkatan unit usaha UMi	2%	2,49%	2%
		Persentase peningkatan unit Industri Kecil dan Menengah	5%	5,52%	5%
		Peningkatan Skala usaha UMi	2%	7,07%	2%
		Kapasitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Unggulan (industri makanan)	3.147,18 Ton/Thn	3.244,49 Ton/Thn	3.147,18 Ton/Thn
		Kapasitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Unggulan (industri kerajinan)	212.492 Unit/Thn	203.721 Unit/Thn	212.492 Unit/Thn
13.	Berkembangnya ragam usaha dan produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Jumlah ragam usaha UMi	140	137	140
		Jumlah ragam usaha Industri Kecil dan Menengah	52	50	52
		Jangkauan pasar produk UMi	DK=99 % AK=0,65 % AP=0,35%	DK=86,46% AK=13,10% AP=0,44%	DK=99 % AK=0,65 % AP=0,35%
		Jangkauan pasar produk unggulan Industri Kecil dan Menengah	DK=98,% AK=1,25% AP=0,75%	DK=95,9% AK=1,16% AP=2,94%	DK=98,% AK=1,25% AP=0,75%
		Kontribusi UMi, Industri Kecil dan Menengah terhadap PDRB	9,66%	9,95%	11,26%

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2020	REALISASI 2019	TARGET PERUBAHAN RKPD 2020
14.	Berkembangnya destinasi wisata	Kunjungan wisata	220.000 orang	136.252 orang	50.000 orang
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,66%	1,26%	1,26%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	20%	-12,00%	5%
15.	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintergrasi dengan program pariwisata	39%	50%	39%
16.	Meningkatnya konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	1,2	1,25	1,2
17.	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	94,76%	51,35%	94,76%
18.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peringkat Ujian Nasional se-Provinsi Bangka Belitung	SD 2 SMP 2	SD - SMP 6	- -
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,05	11,52	13,05
		Angka Rata-rata Lama Sekolah kabupaten	8,07	7,21	8,07
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,59 Tahun	69,99 Tahun	70,05 Tahun
20.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	88,23%	31,58%	88,23%
21.	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat provinsi	Popda 3	6 (Kejurda)	-
		Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	-	6 (Kejurda)	-
22.	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan yang berbudaya/	Persentase desa/ kelurahan yang melakukan pengelolaan	8%	12,5%	8%

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2020	REALISASI 2019	TARGET PERUBAHAN RKPD 2020
	berwawasan lingkungan	lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan			
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup secara aktif	11	10	11
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	60%	28,04%	60%
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	16%	7,81%	16%
24.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	90%	93,79%	90%
25.	Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/ kelurahan/ titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/genangan air	80%	80%	80%
26.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	1,5%	-	1,5%
27.	Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah dikonservasi	28%	33,33%	28%
28.	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%	12%	100%
29.	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase ruang terbuka hijau	2,75%	0,11%	2,75%

2.5. PERUBAHAN APBD TAHUN 2020

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, didukung oleh program dan kegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020, perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
PENDAPATAN	900.009.421.572,00	882.595.665.195,50	(17.413.756.376,50)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	72.519.688.000,00	75.781.823.857,35	3.262.135.857,35
Pendapatan Pajak Daerah	30.285.000.000,00	26.246.000.000,00	(4.039.000.000,00)
Hasil Retribusi Daerah	5.844.000.000,00	5.239.250.000,00	(604.750.000,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.700.000.000,00	4.694.900.000,00	994.900.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.690.688.000,00	39.601.673.857,35	(6.910.985.857,35)
DANA PERIMBANGAN	676.975.064.000,00	635.414.533.450,00	(41.560.530.550,00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.946.194.000,00	90.834.464.640,00	27.888.270.640,00
Dana Alokasi Umum	480.279.507.000,00	427.997.278.000,00	(52.282.229.000,00)
Dana Alokasi Khusus	133.749.363.000,00	116.582.790.810,00	(17.166.572.190,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.514.669.572,00	171.399.307.888,15,00	7.201.252.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	24.838.720.000,00	24.838.720.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.594.204.572,00	42.446.665.528,15	(4.147.539.043,85)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.081.745.000,00	82.338.269.000,00	23.256.524.000,00

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.000.000.000,00	21.775.653.360,00	1.775.653.360,00
BELANJA	1.079.280.015.508,36	982.649.416.270,45	(96.630.599.237,91)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	511.134.180.508,00	467.320.554.401,45	(43.813.626.106,55)
Belanja Pegawai	365.000.000.000,00	317.250.000.000,00	(47.750.000.000,00)
Belanja Hibah	25.110.000.000,00	36.669.246.408,00	11.559.246.408,00
Belanja Bantuan Sosial	252.595.000,00	252.595.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3.612.900.000,00	2.632.213.729,45	(980.686.270,55)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	116.158.685.508,00	110.316.499.264,00	(5.842.186.244,00)
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	(800.000.000,00)
BELANJA LANGSUNG	568.145.835.000,36	515.328.861.869,00	(52.816.973.131,36)
SURPLUS / (DEFISIT)	(179.270.593.936,36)	(100.053.751.074,95)	79.216.842.861,41
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	191.270.593.936,36	103.053.751.074,95	(88.216.842.861,41)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	191.070.593.936,36	102.853.751.074,95	(88.216.842.861,41)
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO	179.270.593.936,36	100.053.751.074,95	(79.216.842.861,41)
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Nomor 54 tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); serta
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016, Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2020 dan Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020.

Melalui kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin untuk dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari

berbagai pihak baik dari elemen pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja di tahun ini dan perubahan perjanjian kinerja ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan kedepan.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. SAHIRMAN JUMLI, M.Si.

Jabatan : Pjs. BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muntok, 11 November 2020

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

Drs. H. SAHIRMAN JUMLI, M.Si.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KABUPATEN BANGKA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-7.01
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69.1
		Angka Kemiskinan	%	3.34
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.08
		PDRB Per Kapita	rupiah	64,173,193
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8.44
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	67
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80.73
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	79.76
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	83
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	milyar rupiah	100
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	milyar rupiah	3,391
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68

No.	Program	Anggaran	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	85,938,167,075.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	59,681,267,940.00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	55,580,000.00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	479,377,550.00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	216,198,000.00
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	5,752,236,000.00
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	40,288,368,000.00
8	Program Pendidikan Non Formal	Rp	10,839,405,000.00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	573,595,000.00
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	46,030,000.00
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun	Rp	9,321,100,000.00
12	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp	316,036,000.00
13	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp	687,827,000.00
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp	209,000,000.00
15	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Rp	38,425,000.00
16	Program Penyelenggaraan Olahraga Daerah	Rp	383,174,000.00
17	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	4,830,047,817.00
18	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Rp	21,292,228,612.00
19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	106,946,000.00
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	5,875,000.00
21	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Rp	588,885,400.00

No.	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 85,938,167,075.00
22	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp 3,977,436,374.00
23	Program pengawasan dan pengendalian Obat dan kesehatan makanan	Rp 9,318,300.00
24	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp 1,603,206,000.00
25	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Rp 1,183,480,500.00
26	Program Sumber Daya Kesehatan	Rp 6,017,015,600.00
27	Program Kesehatan komunitas dan kesehatan kerja	Rp 21,970,000.00
28	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 665,800,000.00
29	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rs Jiwa/ Rs Paru/ Rs Mata	Rp 32,171,340,000.00
30	Program Peningkatan Mutu layanan kepada masyarakat (BLUD)	Rp 19,000,000,000.00
31	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 7,435,000.00
32	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	Rp 10,124,672,200.00
33	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 5,005,288,000.00
34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Rp 11,150,899,500.00
35	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rp 25,433,500,000.00
36	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 26,882,910,400.00
37	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp 155,475,000.00
38	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 1,858,680,000.00
39	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp 155,450,000.00
40	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 295,042,400.00
41	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp 136,900,000.00
42	Program Pengendalian Banjir	Rp 827,256,900.00
43	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Rp 1,240,180,000.00
44	Program Pemanfaatan Ruang	Rp 115,000,000.00
45	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 132,800,000.00
46	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 2,810,155,310.00
47	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 5,499,744,000.00
48	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp 999,411,841.00
49	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Rp 2,449,687,200.00
50	Program Areal Pemakaman	Rp 30,220,000.00
51	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Rp 1,717,563,500.00
52	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 2,487,865,000.00
53	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp 3,823,183,000.00
54	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 39,670,000.00
55	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp 1,481,209,000.00
56	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp 371,519,000.00
57	Program Pendataan dan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Asing	Rp 45,825,000.00
58	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp 177,338,000.00
59	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp 149,554,800.00
60	Program Pendidikan Politik masyarakat	Rp 163,092,000.00
61	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 38,992,500.00
62	Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2,213,349,500.00
63	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 699,038,900.00
64	Program Sosial Penanganan bencana	Rp 12,835,660,000.00
65	Program Pendayagunaan TTG dan SDA	Rp 36,630,000.00
66	Program Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa	Rp 23,565,000.00
67	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp 659,424,000.00

No.	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 85,938,167,075.00
68	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	Rp 93,145,000.00
69	Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1,208,435,500.00
70	Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 104,145,000.00
71	Program Pendataan Desa Kab. Bangka Barat	Rp 18,981,000.00
72	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 182,736,500.00
73	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Rp 10,520,000.00
74	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 45,415,000.00
75	Program peningkatan promosi & kerjasama investasi	Rp 12,020,000.00
76	Program peningkatan iklim investasi & realisasi investasi	Rp 8,300,000.00
77	Program peningkatan & pengembangan pengelolaan perizinan	Rp 110,660,000.00
78	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Rp 140,900,000.00
79	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 115,790,000.00
80	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 17,845,000.00
81	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 162,970,000.00
82	Program Keluarga Berencana	Rp 79,565,000.00
83	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp 6,820,000.00
84	Program Advokasi, KIE dan Penggerakan Masyarakat	Rp 33,610,000.00
85	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Rp 84,059,000.00
86	Program Peningkatan Dukungan Sarana Prasarana Penyuluhan KB	Rp 1,070,477,500.00
87	Program Peningkatan Pelayanan KB	Rp 1,234,368,000.00
88	Program Fasilitasi Balai Penyuluh KB	Rp 636,840,000.00
89	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp 208,697,000.00
90	Program Penyediaan Informasi Ketahanan Pangan Daerah	Rp 52,537,000.00
91	Program Pengembangan Kelembagaan Petani	Rp 60,490,000.00
92	Program Pengembangan Penyuluhan	Rp 15,575,000.00
93	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp 17,630,000.00
94	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan	Rp 91,483,000.00
95	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Rp 210,378,900.00
96	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp 179,525,000.00
97	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp 182,950,000.00
98	Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan	Rp 74,580,000.00
99	Program peningkatan produksi perkebunan	Rp 574,470,000.00
100	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Rp 19,610,000.00
101	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Rp 41,395,000.00
102	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Rp 838,247,500.00
103	Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan	Rp 1,285,000.00
104	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 181,420,000.00
105	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 124,665,000.00
106	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 10,107,000.00
107	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 7,800,000.00
108	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 6,111,971,000.00
109	Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 177,628,000.00
110	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 975,185,000.00
111	Program Layanan Pencatatan Sipil	Rp 38,850,000.00
112	Program Pemanfaatan Sistem Informasi untuk pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp 5,060,000.00
113	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan media massa	Rp 944,437,000.00
114	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Rp 980,865,000.00
115	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp 7,600,000.00
116	Program Pengembangan Data/ Informasi	Rp 52,659,000.00

No.	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 85,938,167,075.00
117	Program Pengembangan Statistik Daerah	Rp 211,163,000.00
118	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Rp 15,340,000.00
119	Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp 223,500,000.00
120	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 727,407,000.00
121	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	Rp 257,456,000.00
122	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Rp 63,235,000.00
123	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 4,339,960,000.00
124	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 30,000,000.00
125	Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Rp 8,550,000.00
126	Program Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Rp 56,700,000.00
127	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp 56,775,000.00
128	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Kawasan Pedesaan	Rp 8,600,000.00
129	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah	Rp 368,460,000.00
130	Program Penataan Struktur Industri	Rp 95,880,000.00
131	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp 379,985,000.00
132	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp 108,855,000.00
133	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp 197,315,000.00
134	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 720,060,000.00
135	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp 2,779,984,700.00
136	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 10,185,000.00
137	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Rp 223,203,000.00
138	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rp 59,449,000.00
139	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Rp 59,705,000.00
140	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar	Rp 654,893,000.00
141	Program pengembangan perikanan tangkap	Rp 1,474,635,000.00
142	Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Rp 108,225,000.00
143	Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan	Rp 95,726,000.00
144	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rp 1,704,102,000.00
145	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1,698,372,000.00
146	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Rp 1,277,131,000.00
147	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 25,650,000.00
148	Program pembinaan kehidupan beragama	Rp 2,425,224,000.00
149	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Rp 361,918,400.00
150	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Pembangunan	Rp 284,870,000.00
151	Program Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	Rp 43,415,000.00
152	Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp 157,403,500.00
153	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp 39,870,000.00
154	Program Kerjasama Pembangunan	Rp 48,705,000.00
155	Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Rp 100,632,000.00
156	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 131,943,000.00
157	Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp 200,525,000.00
158	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Rp 22,917,827,500.00
159	Program peningkatan semangat kebangsaan	Rp 179,970,000.00
160	Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah	Rp 325,677,600.00
161	Program Penyelenggaraan Tugas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah	Rp 226,951,650.00
162	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Rp 237,950,500.00
163	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perpedesaan	Rp 186,415,000.00
164	Program Penyempurnaan Kualitas Pelayanan	Rp 7,754,561,500.00

No.	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 85.938.167.075,00
165	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp 760.570.000,00
166	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Rp 10.000.000,00
167	Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 294.678.500,00
168	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 143.914.800,00
169	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 1.106.707.500,00
170	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Rp 1.532.798.700,00
171	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.268.182.500,00
172	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 241.286.000,00
173	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Rp 251.104.000,00
174	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 3.549.988.500,00
175	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.355.127.500,00
176	Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 1.621.042.500,00
177	Program Optimalisasi PBB & BPHTB	Rp 1.166.278.000,00
178	Program Peningkatan Kompetensi ASN	Rp 1.135.352.500,00
179	Program Pemanfaatan Database ASN dan Layanan Kesejahteraan	Rp 301.857.000,00
180	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 787.386.500,00
Total Belanja Langsung		Rp 515.328.861.869,00

Keterangan :

1. Proporsi DAK sebesar 16,04% dari total belanja langsung
2. Proporsi DABA sebesar 4,23% dari total belanja langsung

Muntok, 11 November 2020
 Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

 Dwi H. SAHRMAN JUMLI, M.Si.